



BUPATI SUPIORI
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUPIORI
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUPIORI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancangan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem

- Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Pelaksana Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Diwilaya Provinsi Papua;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731)
33. Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-12 Tahun 2022 Tanggal 18 Februari 2022 tentang Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2022.
34. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Supiori (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2016 Nomor 4).
35. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Supiori;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2022;
37. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
38. Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp697.333.849.325,00 (Enam ratus sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah
- b. Pendapatan transfer
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp.11.024.195.000,00 (*sebelas milyar dua puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.295.000.000,00 (*tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah*)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.405.000.000,00 (*empat ratus lima juta rupiah*)
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*)
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.324.195.000,00 (*lima milyar tiga ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*)

Pasal 4

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.3.295.000.000,00 (*tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak kendaraan motor;
 - b. Dst (sesuai dengan objek pajak daerah pada provinsi Dan kabupaten/kota).
- (2) Pajak kendaraan motor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (*nol*)

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak kendaraan motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (*nol*) yang terdiri atas:

- a. Mobil penumpang – sedang;
 - b. Dust (sesuai Dengan rincian objek pajak daerah pada provinsi Dan kabupaten/kota).
- (2) Mobil penumpang – sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. (nol)

Pasal 6

(sesuai dengan kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan)

Pasal 7

Rp709.291.104.647,00 (Tujuh ratus Sembilan milyar dua ratus Sembilan puluh satu juta seratus empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1)Anggaran belanja operasional sebagaimana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp.511.080.715.687,00 (*Lima ratus sebelas milyar delapan puluh juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp244.253.287.998,00 (*dua ratus empat puluh empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*)
- (3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp232.128.485.454,00 (*Dua ratus tiga puluh dua milyar serratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*)
- (4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (nol)
- (5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (nol)
- (6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.20.938.176.000,00 (*dua puluh milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah*)

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.760.766.235,00 (*Tiga belas Milyar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah*)

Pasal 9

- (8) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp244.253.287.998,00 (*Dua ratus empat puluh empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah*)

(1) yang terdiri atas:

- a. Gaji dan tunjangan;
- b. Tambahan Penghasilan Pegawai

- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.159.821.774.180,00 (*seratus enam puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah*)

- (3) Tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.84.431.513.818,00 (*Delapan puluh empat milyar empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah*)

Pasal 10

- (1) Anggaran Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.159.821.774.180,00 (*seratus enam puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Gaji pokok ASN;
- b. Tunjangan ASN.

- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.107.821.674.206,00 (*Seratus tujuh milyar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam rupiah*)

- (3) Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 52.000.099.974,00 (*lima puluh dua milyar Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*)

Pasal 11

(sesuai dengan kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja)

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.14.557.255.322,00 (*empat belas milyar lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.14.557.255.322,00 (*empat belas milyar lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.557.255.322,00 (*empat belas milyar lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah*)
- (3) Pencairan Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (*nol*)
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (*nol*)
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (*nol*)
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. (*nol*)
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0 (*nol*)

Pasal 14

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.557.255.322,00 (*empat belas milyar lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Dst (sesuai Dengan objek pada SiLPA);
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (*nol*)

Pasal 15

- (1) Anggaran Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (*nol*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Dst (sesuai Dengan rincian objek pada Pelampauan penerimaan PAD).
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (*nol*)

Pasal 16

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.600.000.000,00 (*dua ratus enam puluh milyar rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilian pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah;
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (*nol*)
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.600.000.000,00 (*dua ratus enam puluh milyar rupiah*)
- (4) Pembayaran cicilian pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (*nol*)
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (*nol*)
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0 (*nol*)

Pasal 17

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (*nol*) yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Dst (sesuai dengan rincian objek pada Pembentukan dana cadangan).
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (*nol*)

Pasal 18

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.(11.957.255.322,00) (*sebelas milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah*).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.(11.957.255.322,00) *(sebelas milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).*

Pasal 19

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- | | | | |
|----|----------|------|--|
| 1. | Lampiran | I | Ringkasan penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan; |
| 2. | Lampiran | II | Penjabaran APBD Menurut Urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, program, kegiatan, Sub Kegiatan, kelompok Jenis, objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembayaan; |
| 3. | Lampiran | III | Daftar Nama Penerimaan, Alamat Penerimaan, dan Besaran Hibah; |
| 4. | Lampiran | IV | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; |
| 5. | Lampiran | V | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; |
| 6. | Lampiran | VI | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil |
| 7. | Lampiran | VII | Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Dan Sub Rincian Objek Pendapatan Belanja dan Pembiayaan. |
| 7. | Lampiran | VII | Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Dan Sub Rincian Objek Pendapatan Belanja dan Pembiayaan. |
| 8. | Lampiran | VIII | Rincian DBH-SDA Tambahan Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan; |

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda Tentang Penjabaran APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD Dengan Program Prioritas Negara Perbatasan.

Pasal 20

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

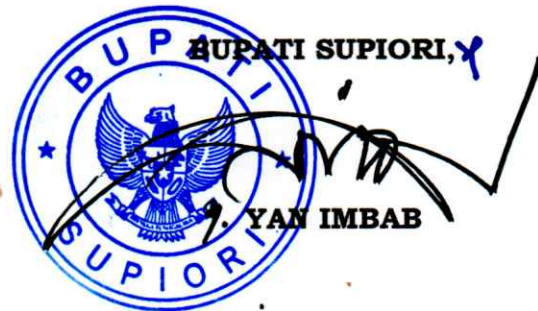
Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Supiori.

Ditetapkan di Sorendiweri
pada tanggal 22 Februari 2022



Diundangkan di Sorendiweri
Pada Tanggal 23 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUPIORI



Dra. FERRA WANGGAI, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2022 NOMOR 03

KABUPATEN SUPIORI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.024.195.000
4.1.01	Pajak Daerah	3.295.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.000.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.000.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.000.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	75.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	75.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	75.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	70.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	70.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	70.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.000.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.000.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	50.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	50.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	50.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	100.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	100.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	100.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	405.000.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	100.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	100.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	100.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	290.000.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	150.000.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	150.000.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	30.000.000
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	30.000.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	10.000.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	10.000.000
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	100.000.000
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	100.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	15.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	10.000.000

KABUPATEN SUPIORI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.000.000.000
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	2.000.000.000
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	2.000.000.000
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	2.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.324.195.000
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.824.195.000
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	2.824.195.000
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	2.824.195.000
4.1.04.05	Jasa Giro	2.000.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	500.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	500.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	500.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	677.910.944.325
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	670.973.241.048
4.2.01.01	Dana Perimbangan	534.070.129.048
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	37.409.764.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.850.274.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	3.327.826.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	26.548.091.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	764.747.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	408.327.705.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	408.327.705.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	73.786.803.048
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.397.612.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.408.978.000
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	801.750.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	1.513.202.000
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	3.690.750.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	299.250.000
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	2.836.060.000

KABUPATEN SUPIORI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.800.000.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	5.465.000.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	22.545.769.898
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	7.339.657.150
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	4.809.950.000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	1.516.474.000
4.2.01.01.03.0049	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan	12.457.350.000
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	2.905.000.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	14.545.857.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	4.924.741.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	312.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.314.349.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.142.560.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan	182.110.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.221.999.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	2.514.925.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	57.728.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.104.291.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	197.000.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	388.654.000
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	185.500.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	2.070.721.000
4.2.01.02.01	DID	2.070.721.000
4.2.01.02.01.0001	DID	2.070.721.000
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	105.462.694.000
4.2.01.03.01	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	99.723.009.000
4.2.01.03.01.0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	99.723.009.000
4.2.01.03.04	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua	5.739.685.000
4.2.01.03.04.0001	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua	5.739.685.000
4.2.01.05	Dana Desa	29.369.697.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	29.369.697.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	29.369.697.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	6.937.703.277
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	6.937.703.277
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	6.937.703.277
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	936.797.646

KABUPATEN SUPIORI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	540.751.168
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.094.296.123
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.092.931.034
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.272.927.306
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.398.710.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.398.710.000
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	8.398.710.000
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	8.398.710.000
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	8.398.710.000
	Jumlah Pendapatan	697.333.849.325
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	511.080.715.687
5.1.01	Belanja Pegawai	244.253.287.998
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	159.821.774.180
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	107.872.674.206
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	102.456.886.728
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	5.415.787.478
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	8.174.214.076
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	8.174.214.076
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.707.160.500
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.707.160.500
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	2.690.449.860
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2.690.449.860
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.087.408.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.087.408.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	12.089.096.160
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	12.089.096.160
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	121.678.542
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	121.678.542
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.712.799
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.712.799
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	4.883.453.896
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	4.883.453.896
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	245.894.868
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	245.894.868
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	737.688.273
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	737.688.273

KABUPATEN SUPIORI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus	14.210.343.000
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus	14.210.343.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	67.010.485.840
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	60.790.945.840
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	60.790.945.840
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	19.110.000
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	19.110.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	248.430.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	248.430.000
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	5.952.000.000
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	5.952.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.051.050.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	4.924.741.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	4.924.741.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.314.349.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	2.314.349.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	312.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	312.000.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	34.320.000
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	34.320.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	465.640.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.500.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	65.140.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	387.000.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.941.278.278
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	473.854.500
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	473.854.500
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	66.339.630
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	66.339.630
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	85.165.920
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	85.165.920
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	47.385.450
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	47.385.450
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	687.089.025
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	687.089.025
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	85.718.273
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	85.718.273
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.087.000.000

KABUPATEN SUPIORI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.087.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	661.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	661.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	743.858.837
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	743.858.837
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	17.640
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	17.640
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.549.003
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.137.251
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.411.752
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.998.800.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.998.800.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	208.199.700
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	57.330.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	57.330.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.026.200
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.026.200
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	103.194.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	103.194.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	38.689.208
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	38.689.208
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	407.866
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	407.866
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.058
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.058
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	137.592
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	137.592
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	412.776
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	412.776
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	220.500.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	220.500.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	220.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.128.485.454
5.1.02.01	Belanja Barang	88.880.606.758
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	88.880.606.758
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	371.945.960
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.711.993.138
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	312.103.000

KABUPATEN SUPIORI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	332.680.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	121.900.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	95.000.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	165.397.600
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.470.207.060
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	156.375.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.039.409.374
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.387.379.595
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.320.800.018
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.305.779.140
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	58.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	325.716.210
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	157.500.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	661.965.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	67.092.676
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	124.832.500
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	903.834.926
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.900.568.227
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.133.874.625
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	14.554.160.949
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.927.260.860
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.558.645.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	26.690.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.318.505.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	53.470.400
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	52.325.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	489.720.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	570.537.100
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	251.122.900
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	380.530.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	517.250.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	54.000.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	2.035.500
5.1.02.02	Belanja Jasa	88.122.407.220
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	50.256.441.726

KABUPATEN SUPIORI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.958.236.250
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14.854.182.622
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	66.000.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	27.200.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	424.094.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	70.000.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	33.804.600
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.928.538.600
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	45.000.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.908.327.060
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.583.000.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.279.800.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	437.096.182
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.176.650.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.979.500.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.173.175.804
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	879.320.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	72.000.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	48.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	7.500.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	67.830.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	20.400.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.471.000.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	896.500.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	480.000.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	500.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.000.000
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	102.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	222.430.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	180.040.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.470.810.774
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	629.994.800
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	236.354.034
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	2.802.657.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	1.220.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	54.108.600

KABUPATEN SUPIORI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	54.108.600
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	13.000.000
5.1.02.02.03.0017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	13.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	19.650.623.998
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	11.105.905.100
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.445.604.518
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	426.511.300
5.1.02.02.04.0048	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	645.500.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.037.066.400
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	186.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	310.900.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	125.000.000
5.1.02.02.04.0146	Belanja Sewa Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	15.600.000
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	4.536.680
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	30.000.000
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	9.000.000
5.1.02.02.04.0416	Belanja Sewa Elektronik/Electric	309.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.379.200.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	984.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	62.500.000
5.1.02.02.05.0038	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	60.000.000
5.1.02.02.05.0039	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan II	48.000.000
5.1.02.02.05.0040	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan III	24.000.000
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	158.800.000
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	12.900.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.029.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	4.000.000
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	4.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	8.375.982.376
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.976.584.989
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	2.128.828.752
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	2.629.210.595
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	132.349.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	309.009.040
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	200.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.409.409.770

KABUPATEN SUPIORI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	1.900.000.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	66.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.681.330.000
5.1.02.02.09.0016	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	302.079.770
5.1.02.02.09.0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata	1.460.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.979.640.750
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.799.640.750
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	180.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	8.557.627.064
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	647.270.000
5.1.02.03.01.0005	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	183.180.000
5.1.02.03.01.0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	464.090.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.598.081.900
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.178.423.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.049.140.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	399.410.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	174.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	161.150.000
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	930.000.000
5.1.02.03.02.0371	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	130.000.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	357.668.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	85.889.200
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	84.150.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	48.251.700
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	820.188.625
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	443.348.625
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	316.840.000

KABUPATEN SUPIORI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.03.0013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	60.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	492.086.539
5.1.02.03.04.0094	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	362.086.539
5.1.02.03.04.0100	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	130.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	42.370.484.412
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.370.484.412
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	169.972.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.891.235.412
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	193.282.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	30.115.995.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.243.200.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.204.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	354.000.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	850.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.039.200.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.039.200.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.954.160.000
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.954.160.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.954.160.000
5.1.05	Belanja Hibah	20.938.176.000
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	100.000.000
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	100.000.000
5.1.05.02.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	100.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	8.610.516.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.425.516.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.425.516.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	185.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	185.000.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	12.227.660.000
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	6.936.160.000
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	6.936.160.000
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	5.268.400.000

KABUPATEN SUPIORI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	5.268.400.000
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	23.100.000
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	23.100.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13.760.766.235
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	662.000.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	662.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	662.000.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	5.314.403.835
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	5.314.403.835
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	5.314.403.835
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	603.362.400
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	181.302.400
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	181.302.400
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	422.060.000
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	422.060.000
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	7.181.000.000
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	7.181.000.000
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	7.181.000.000
5.2	BELANJA MODAL	135.507.756.475
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	1.000.000.000
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	1.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.200.711.273
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.687.600.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.630.000.000
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	1.630.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	57.600.000
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	30.000.000
5.2.02.01.03.0014	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	27.600.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	8.825.613.618
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	8.322.431.800
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.538.931.800
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	700.000.000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	600.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	283.500.000

KABUPATEN SUPIORI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.200.000.000
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	503.181.818
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	503.181.818
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	95.135.100
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	95.135.100
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	77.135.100
5.2.02.03.02.0010	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	18.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	6.379.704.464
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	6.379.704.464
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	46.830.000
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	6.332.874.464
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.618.555.248
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	856.989.638
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	856.989.638
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.761.565.610
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.529.358.960
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	2.565.021.650
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	667.185.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	449.089.500
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	449.089.500
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	205.000.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	60.000.000
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	89.340.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	94.749.500
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.617.366.875
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.017.366.875
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.017.366.875
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	600.000.000
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	600.000.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	337.125.000
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	17.125.000
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	17.125.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	320.000.000
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	320.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.247.348.968
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.130.302.720
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	1.048.400.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.015.401.470

KABUPATEN SUPIORI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	66.501.250
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.117.046.248
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	986.756.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	130.290.248
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	4.569.452.500
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	4.569.452.500
5.2.02.13.03.0002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	4.569.452.500
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	78.220.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	78.220.000
5.2.02.15.02.0003	Belanja Modal Topi Kerja	4.830.000
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	62.890.000
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	10.500.000
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	100.000.000
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	100.000.000
5.2.02.17.01.0026	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	100.000.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	195.500.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	195.500.000
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	20.000.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	175.500.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.440.433.179
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	28.267.413.179
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	28.267.413.179
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	12.537.994.700
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.961.582.104
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	167.100.000
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	327.950.000
5.2.03.01.01.0026	Belanja Modal Bangunan Penampung Sekam	186.000.000
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	1.860.000.000
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	8.315.786.275
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	830.000.100
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	1.081.000.000
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	32.470.000
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	32.470.000
5.2.03.02.01.0004	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	32.470.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	140.550.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	140.550.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	140.550.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.862.506.623

KABUPATEN SUPIORI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	56.741.046.727
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	47.245.442.217
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	31.831.769.361
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	8.376.000.000
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	7.037.672.856
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	9.495.604.510
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	7.366.968.000
5.2.04.01.02.0011	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	2.128.636.510
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	5.990.209.100
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	444.969.100
5.2.04.03.01.0003	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam	44.969.100
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	400.000.000
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	5.545.240.000
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	5.295.240.000
5.2.04.03.05.0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	250.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	7.131.250.796
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	4.731.250.796
5.2.04.04.01.0002	Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi	1.568.021.146
5.2.04.04.01.0004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	1.180.401.000
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	1.982.828.650
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.400.000.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	2.400.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.004.105.400
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	146.987.900
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	146.987.900
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	56.234.700
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	19.559.400
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	17.262.000
5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	5.826.800
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	40.195.000
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	5.894.000
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	2.016.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	71.117.500
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	71.117.500
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	71.117.500
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	786.000.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	786.000.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	786.000.000

KABUPATEN SUPIORI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.360.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.360.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.360.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.360.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	4.360.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	58.342.632.485
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	58.342.632.485
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	58.342.632.485
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	58.342.632.485
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	58.342.632.485
	Jumlah Belanja	709.291.104.647
	Total Surplus/(Defisit)	(11.957.255.322)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	14.557.255.322
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.557.255.322
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	14.557.255.322
6.1.01.07.02	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	14.557.255.322
6.1.01.07.02.0001	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	14.557.255.322
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	14.557.255.322
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.600.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.600.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.600.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.600.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.600.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.600.000.000
	Pembiayaan Netto	11.957.255.322

Bupati Supiori

 Drs. YAN IMBAB